BADAN PERENCANAAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN UJI TERAP PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

2007

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN

Ahli Utama S3 - 12 tahun	: 1. Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D.
	2. Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si.
Ahli S2 - 8 tahun	: 1. Dr. Kodrat Wibowo
	2. Dr. H. Nandang Alamsah D., S.H., M.H.
Ahli Muda S2 – 5 tahun	: 1. Tjipto Atmoko, Drs., S.U.
	2. R. Widya Setiabudhi, S.IP., S.Si., M.T.
Ahli S1 – 8 tahun	: 1. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si.
	2. Rina Hermawati, S.IP., M.Si.
Ahli Muda S2 – 2 tahun	: 1. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
	2. Toni Thoharuddin, S.Si., M.A.
Ahli Muda S1 – 4 tahun	: 1. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si.
	2. Ari Ganjar, S.Sos.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir (*Final Report*) "**PENYUSUNAN UJI TERAP PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN",** yang merupakan kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad).

Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain basis data pengukuran Indeks Pemerintahan, hasil uji terap dan analisis survei uji terap Indeks Pemerintahan yang menggambarkan relasi antar-*stakeholders* dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.

Harapan kami, mudah-mudahan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran hasil survei uji terap Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Atas kepercayaan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran untuk menjadi pelaksana kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Lembaga Penelitian Unpad
Ketua,

Prof. Dr. Johan S. Masjhur, dr., Sp.PD-KE
NIP. 130 256 894

Puslit KP2W
Lembaga Penelitian
Universitas Padjadjaran
Kepala,

Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si
NIP. 131 760 499

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Identifikasi Masalah	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Kegunaan	4
	1.5 Metode Penelitian	4
BAB II	**PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN BERBASIS *GOVERNANCE***	9
BAB III	**BASIS DATA INDEKS PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT**	15
	3.1 Partisipasi Warga (*Citizen Participation*)	17
	3.2 Orientasi Pemerintah (*Government Orientation*)	21
	3.3 Pembangunan Sosial (*Social Development*)	23
	3.4 Pengelolaan Ekonomi (*Economic Management*)	24
BAB IV	**HASIL UJI TERAP PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT**	27
BAB V	**ANALISIS PRAKTIK PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN HASIL UJI TERAP INDEKS PEMERINTAHAN**	30
	5.1 Kalangan Akademisi	30
	5.2 Kalangan Partai Politik	31
	5.3 Kalangan Organisasi Nonpemerintah	33
	5.4 Kalangan Pelaku Usaha (Pasar)	34
	5.5 Kalangan Pers	35
	5.6 Kalangan Tokoh Masyarakat	37

5.7 Kalangan Tokoh Agama 38
5.8 Kalangan Pemerintah (*Government*) 40

BAB VI PENUTUP 42

DAFTAR PUSTAKA 46

LAMPIRAN
- Kuesioner
- Coding Sheet

DAFTAR TABEL

TabeL 2.1	Indeks Governacnce versi Principal Component Analysis	12
Tabel 4.1	Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007	27
Tabel 4.2	Tipologi Kualitas *Governance* Model TUGI	28
Tabel 4.3	Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan Kelompok Responden	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang lazim disebut dengan *good governance*. Paradigma ini mensyaratkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, di mana pengambilan keputusan melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders* terkait. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam pengelolaan dan distribusi barang dan jasa publik. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik berpedoman pada seperangkat prinsip, antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, jejaring kerjasama, dll. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, baik di level nasional maupun lokal.

Sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut, telah dikembangkan sejumlah model pengukuran Indeks *Governance*, antara lain yang disusun oleh Huther dan Shah (1998), Manning, Mukherjee dan Gokcekus (2000), Kaufmaan, Kraay, dan Lobaton (2002), serta Ronald Duncan, Teuea Toatu, dan Azmat Gani (2004). Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran indeks *governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional), *Governance Decentralization Survey* (GDS) melakukan pengukuran

indeks *governance* untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi.

Dengan mengadaptasi model-model sebelumnya, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun suatu model pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* (2006) yang meliputi sub-subvariabel: partisipasi warga; orientasi pemerintah; pembangunan sosial; dan pengelolaan ekonomi. Studi yang dilakukan pada tahun 2006 tersebut mensimulasikan model pengukuran indeks pemerintahan dengan menggunakan analisis *principal component* dengan mengolah data sekunder yang tersedia. Hasil simulasi ini menyimpulkan bahwa nilai Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat adalah 52,68 yang tergolong dalam kategori cukup.

Sebagai tindak lanjut dari hasil simulasi tersebut, perlu dilakukan uji terap model pengukuran Indeks Pemerintahan agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat mengenai praktik tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Uji terap ini direncanakan dalam bentuk survei yang dilakukan dengan menyebar kuesioner pada instansi pemerintah, kelompok usaha, dan kelompok masyarakat sebagai komponen dalam *governance*. Hasil uji terap ini diharapkan akan menghasilkan data yang akurat untuk keperluan evaluasi praktik tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dan penyempurnaan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana basis data pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil uji terap pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* di Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana analisis tentang praktik pemerintahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil uji terap pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance*?

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan survei uji terap model pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *Governance* di Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Menyusun basis data pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengukur hasil uji terap pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* di Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis tentang praktik pemerintahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil uji terap pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance*.

1.4 Kegunaan

Kegiatan uji terap desain tersebut diharapkan akan menghasilkan Indeks Pemerintahan berbasis *Governance* yang selanjutnya dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi praktik tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk sampai pada tujuan penelitian. Melalui metode survey kualitas *governance* diukur berdasarkan persepsi *well-informed persons* tentang berbagai indikator governance yang dikembangkan dalam penelitian ini. Penilaian responden terhadap kualitas governance menggunakan skala ordinal yang memiliki rentang antara 1 sampai dengan 5 dimana semakin tinggi angka yang diberikan, maka semakin tinggi/baik persepsi responden terhadap pernyataan/unsur yang dinilai.

Kualitas *governence* secara keseluruhan merupakan agregat dari nilai-nilai variabel *governance* yang ditetapkan. Dalam hal ini secara formal kualitas governance dirumuskan sebagai berikut:

$$G = \frac{aCP + bGO + cSD = dSD}{4}$$

Di mana:

G = indeks kualitas governance

CP = variabel partisipasi warga

GO = variabel orientasi pemerintah

SD = variabel pembangunan masyarakat

EM = variabel pengelolaan ekonomi

a = skor indeks CP

b = skor indeks GO

c = skor indeks SD

d =skor indeks EM

Sedangkan nilai-nilai a, b, c dan d diperoleh melalui penghitungan rata-rata responden terhadap indikator-indikator dari keempat variabel *governance*.

Pertama-tama yang harus dipahami adalah bahwa proses penilaian *governance* dalam penelitian ini menyangkut penilaian *governance* dalam konteks pemerintah provinsi Jawa Barat. Dengan demikian harus dapat dipastikan bahwa responden tidak akan keliru atau salah paham dalam memberikan penilaian, jangan sampai responden menilai performa *governance* pemerintah Provinsi Jawa Barat tetapi sebenarnya yang dia nilai adalah performa dari sebuah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota atau pemerintah pusat.

Kekeliruan ini dapat terjadi mengingat tidak semua unsur *stakeholders* dari pemerintah Provinsi Jawa Barat memahami kewenangan atau urusan apa saja yang sebenarnya menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mana yang bukan. Misalnya menyangkut pelayanan publik, berdasarkan UU No.32 tahun kewenangan atau urusan yang menyangkut penyelenggaraan

pendidikan sekolah dasar (SD) dan pelayanan langsung dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan kewenangan atau urusan dari pemerintah kabupaten/kota. Bila saja ada responden yang menilai pelayanan langsung dari Puskesmas yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat buruk kemudian yang bersangkutan menilai bahwa buruknya pelayanan tersebut terkaiat langsung dengan performa *governance* pemerintah Provinsi Jawa Barat maka tentu penilaian tersebut salah alamat.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka populasi dari penelitian ini perlu dirumuskan dengan jelas. Bila merujuk kepada tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai *governance* di Jawa Barat dalam konteks penilaian terhadap performa *governance* dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maka responden dari penelitian ini adalah mereka yang harus memahami dengan baik tentang konsepsi *governance*, lingkup kewenangan atau urusan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memiliki informasi yang cukup luas tentang data-data yang terkait dengan indikator *governance* seperti yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yang dikembangkan dalam *World Governance Survey (WGS) project* yang merupakan projek UNDP yang dipimpin oleh Goran Hyden dan Julius Court. Tim ini antara lain melakukan survey untuk menilai performa *governance* pada level nasional di India pada tahun 2001. Dalam survey tersebut respondennya adalah para pakar atau orang-orang yang memiliki informasi yang baik dan lengkap mengenai konsep *governance*, mereka kemudian disebut sebagai *well-informed*

persons (WIPs). Mereka terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam birokrasi pemerintah, kalangan pelaku usaha, para profesional di bidang hukum, organisasi internasional, anggota parlemen, akademisi, media massa dan tokoh-tokoh agama. Mereka dipilih oleh koordinator tim peneliti berdasarkan pertimbangan kecukupan pengetahuannya dalam topik *governance*. Tim ini melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung, mengirimkan kuesioner melalui surat, fax maupun email.

Metode yang dikembangkan oleh *World Governance Survey (WGS) project* kemudian dimodifikasi dengan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Misalnya, bila penelitian WGS di India dilakukan pada level negara maka penelitian ini dilakukan pada level provinsi, konsekuensinya sebagaimana telah diungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia melalui UU No.32 tahun 2004 diatur mengenai kewenangan atau urusan dari pemerintah daerah.

Pada tahap perencanaan penelitian ini, semua penelitian dirancang untuk melakukan penelitian di wilayah-wilayah administratif pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pada waktu itu dinilai perlu dilakukan penentuan sampel daerah yang berbasis pada IPM dan letak geografis. Dalam perkembangan berikutnya tim peneliti menilai bahwa pemilihan responden dengan membaginya berdasarkan daerah (IPM dan letak geografis) tidak terlalu urgent kaitannya dengan tujuan penelitian sebaliknya tim peneliti menilai bahwa pemilihan responden lebih bermakna apabila dikaitkan dengan isu *well-informed persons* (WIPs). Mereka yang masuk ke dalam kategori *well-informed persons* dalam konteks governance

pemerintah Provinsi Jawa Barat justru berada di ibukota provinsi, yaitu Bandung. Dengan demikian tim peneliti sepakat bahwa pengumpulan data difokuskan kepada pencapaian *well-informed persons* yang memadai.

Untuk itu ditetapkan bahwa yang termasuk ke dalam *well-informed persons* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur government atau birokrasi, termasuk di dalamnya unsur pemerintah provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi, Pengandilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, KPUD dan KPID.
2. Unsur pasar (pelaku usaha), diwakili oleh asosiasi-asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADINDA Jawa Barat
3. Unsur Civil Society, yang terdiri dari para akademisi, para profesional di bidang hukum, LSM, partai politik, tokoh agama, mahasiswa dan kalangan pers.

Mereka yang dianggap sebagai *well-informed persons* tersebut kemudian diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi penilaian responden terhadap 52 buah indikator *governance*.

BAB II

PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN BERBASIS *GOVERNANCE*

Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan dalam menyusun indeks *governance*, yakni: (1) pendekatan *geometric mean index* yang digunakan oleh Huther dan Shah (1998)[1]; (2) pendekatan *unobserved component* yang digunakan oleh Kaufmann, Kraay, dan Lobaton (1999)[2]; (3) pendekatan *principal component analysis* yang digunakan oleh Toatu (2004)[3]; serta (4) pendekatan *arithmetic mean index* yang digunakan oleh Manning, Mukherjee, dan Gokcekus (2000)[4].

Sekalipun terdapat 4 (empat) pendekatan berbeda, namun pada dasarnya keempat pendekatan tersebut menekankan pada dimensi kuantitatif dari tata kelola pemerintahan yang bersumber

---

[1] Jeff Huther and Anwar Shah. 1998. Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Washington, DC : World Bank

[2] Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Labaton. 1999. *Agregating Governance Indicators*. Washington, DC : World Bank.

[3] Ronald Duncan, Teuea Toatu, dan Azmat Gani. 2004. *A Conceptual Framework for the Development of a Composite Governance Index for the Pacific Island Countries*. Pacific Institute of Advanced Studies in Development and Governance.

[4] N. Manning, R. Mukherjee, dan O. Gokcekus, 2000. *Public Officials and their Institutional Environment.* Washington, D.C : World Bank.

dari pengukuran terhadap indikator agregat (indikator komposit) yang dibentuk dari sejumlah tolok ukur. Pengukuran terhadap indikator-indikator agregat ini kemudian diinterpretasikan, sehingga potensi subyektivitas dan bias memang tetap ada, terutama ketika menentukan pembobotan untuk tiap indikator. Karena itu, pendekatan kualitatif tetap diperlukan sebagai penyeimbang dan pelengkap analisis terhadap hasil pengukuran kuantitatif.

Secara umum, keempat pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* dengan berlandaskan pada konsep *governance* yang mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*). Penjabaran dari keempat prasyarat ini kemudian melahirkan sejumlah model indikator, antara lain yang dibuat oleh Huther dan Shah (1998) sebagai berikut :

1. *Citizen participation* (partisipasi warga) → partisipasi warga, dengan tolok ukur:
    a. Kebebasan politik : mengukur kemampuan warga untuk mempengaruhi kualitas tata pemerintahan yang mereka peroleh.
    b. Stabilitas politik : mengukur kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
2. *Government orientation* (orientasi pemerintah) → keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik (penyediaan barang dan jasa publik), dengan tolok ukur:
    a. Efisiensi yudisial/penegakan hukum

b. Efisiensi birokrasi

c. Tingkat korupsi.

3. *Social development* (pembangunan sosial) → tolok ukur:

   a. Indeks Pembangunan Manusia

   b. Distribusi pendapatan

4. *Economic management* (pengelolaan ekonomi) → kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian diukur melalui indikator kinerja yang mencakup kebijakan fiskal (ratio hutang dan pendapatan/GDP); kebijakan moneter (independensi bank sentral); dan kebijakan perdagangan (orientasi keluar).

   Tolok ukur:

   a. Orientasi keluar : tingkat investasi

   b. Independensi Bank Sentral

   c. Rasio hutang dengan pendapatan

Sejalan dengan model di atas, Kaufmaan, Kraay, dan Lobaton (2002) menyusun indeks *governance* dengan berpatokan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. *Voice and accountability* : mengukur sejauhmana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta independensi media.
2. *Political stability* : mengukur keberlangsungan pemerintahan, termasuk jaminan bahwa pemerintahan yang berlangsung tidak akan digantikan melalui mekanisme inkonstitusional.
3. *Government effectiveness* : mengukur kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi, kompetensi birokrasi, independensi birokrasi, dan kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

4. *Regulatory quality* : mengukur keberpihakan kebijakan-kebijakan publik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. *Rule of law* : mengukur sejauhmana hukum dapat ditegakan melalui mekanisme peradilan yang adil dan akuntabel.
6. *Control of corruption* : mengukur sejauhmana kasus-kasus korupsi, penyuapan, dan sejenisnya dapat ditangani oleh institusi penegak hukum.

Perangkat indikator yang sejenis juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan Ronald Duncan, Teuea Toatu, dan Azmat Gani (2004). Ketiga peneliti tersebut menggunakan indikator-indikator agregat yang tersusun dari komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indeks *Governance* versi *Principal Component Analysis*

Indeks	Indikator
1. Indeks *Rule of Law*	a. Kebebasan Politik b. Stabilitas Politik c. Efektivitas Lembaga Peradilan d. Independensi Media
2. Indeks *Government Effectiveness*	a. Efisiensi Birokrasi b. Pengelolaan ekonomi c. Tingkat korupsi
3. Indeks *Social Development*	a. Indeks Pembangunan Manusia b. Distribusi Pendapatan
4. Indeks *Regulatory Quality*	a. Kapasitas institusi keuangan b. Daya saing

Sumber : Duncan, Toatu, dan Gani (2004)

Model yang keempat dikemukakan oleh Manning, Mukherjee dan Gokcekus (2000) dalam penelitiannya tentang indeks *governance* untuk negara-negara di Asia Pasifik, dengan karakteristik khusus bagi negara-negara yang tergolong miskin. Model yang

ditawarkan berbasis pada metode perhitungan rata-rata aritmatika dengan berpedoman pada kinerja organisasi. Indeks *governance* disusun dengan mencakup kriteria sebagai berikut: (1) *rule credibility*; (2) *policy credibility*; dan (3) *resource adequacy and predictability*. Ketiga indikator ini mencerminkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan.

Secara khusus, pengukuran Indeks *Governance* juga pernah dilakukan di Indonesia ketika UU No. 22 Tahun 1999 baru diberlakukan. Pengukuran ini dilaksanakan dalam bentuk *Governance and Decentralization Surveys* (GDS) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di sekitar 177 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup isu-isu *governance* seperti: (1) akuntabilitas; (2) partisipasi; (3) penegakan hukum; (4) keadilan; (5) responsivitas politisi; (6) tingkat KKN; serta (7) kualitas pelayanan publik.

Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran indeks *governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional), GDS melakukan pengukuran indeks *governance* untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi. Dengan berpatokan pada perbedaan ruang lingkup ini, maka dalam menyusun Indeks Pemerintahan untuk diterapkan di Provinsi Jawa Barat, indikator/tolok ukur yang disusun harus disesuaikan dengan konteks kewenangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar dalam pengukurannya tidak terjadi bias mengingat ada indikator yang kurang tepat diterapkan di level

daerah, seperti indikator kapasitas bank sentral yang hanya dapat diterapkan di level nasional.

BAB III

BASIS DATA INDEKS PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Tolok ukur kinerja pembangunan di Jawa Barat dapat dilihat dari tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada praktiknya, capaian IPM di Jawa Barat mengalami peningkatan, meski besarannya tidak terlampau signifikan. Berdasarkan perhitungan BPS pusat dan Bappenas, IPM Jawa Barat, pada rentang waktu tahun 2002 sampai tahun 2004, naik 5 peringkat, dari peringkat 19 nasional berubah menjadi ranking 14.

Kritik terhadap target pencapaian IPM Jawa Barat dari berbagai pihak saat ini menjadi topik diskusi yang hangat dibicarakan baik di kalangan masyarakat luas, organisasi nonpemerintah maupun unsur birokrasi. Sebagian besar pengkritik mengalamatkan sebab kegagalan tersebut pada kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat, dalam pandangan mereka pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur terlalu optimis dalam menetapkan pencapaian tersebut sementara kondisi objektif tidak mendukung pada upaya pencapaian target tersebut.

Di lain pihak, kegagalan pencapaian target IPM bersifat multivariat dan kompleks. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh belum terwujudnya sinergi kebijakan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota. Di samping itu, kontribusi dunia

usaha atau swasta dan masyarakat masih sangat kecil dalam pencapaian IPM.

Hasil tersebut perlu dikritisi karena tidak semua indikator pembentuk IPM dapat dikontrol oleh pemerintah, misalnya indikator daya beli. Karena itu, evaluasi terhadap pencapaian IPM perlu dilakukan menyeluruh agar dapat mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian IPM. Terkait dengan upaya tersebut, maka pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis *governance* juga diarahkan untuk membangun basis data yang komprehensif dalam rangka mengukur kinerja pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Basis data ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam peningkatan kinerja pemerintahan, sekaligus menjadi *input* bagi pengukuran IPM.

Indeks Pemerintahan berbasis *governance* yang akan diujiterapkan di Provinsi Jawa Barat tersusun dari indikator-indikator yang sejalan dengan ketiga indikator agregat dari IPM. Indikator Indeks Pemerintahan mencakup dimensi politik partisipasi warga; dimensi birokrasi pemerintahan yakni orientasi pemerintah; dimensi pembangunan sosial; dan dimensi pengelolaan ekonomi. Keempat dimensi ini masing-masing menggambarkan fungsi pemerintahan terkait dengan pencapaian IPM sebagai tolok ukur kinerja pembangunan. Dengan mengintegrasikan Indeks Pemerintahan dan IPM, diharapkan Provinsi Jawa Barat nantinya akan memiliki indeks yang komprehensif untuk mengukur kinerja pemerintahan dan pembangunan.

Setidaknya terdapat 2 (dua) tipe pengukuran yang dapat digunakan, yakni pengukuran evaluatif dan deskriptif. Pengukuran kinerja, misalnya, memberikan petunjuk mengenai kualitas *governance*. Misalnya, sejauhmana praktik pemerintahan dikaitkan dengan tingkat korupsi atau apakah kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan instabilitas. Pengukuran proses mendeskripsikan bagaimana *input* diolah menjadi *outcomes* dalam praktik tata kelola pemerintahan. Berbeda dengan pengukuran kinerja, pengukuran proses tidak terkait dengan hal-hal normatif. Sebagai contoh, rata-rata penghasilkan aparat birokrasi dibandingkan dengan tingkat pendapatan pelaku usaha.

Indikator-indikator *governance* akan berbeda untuk tiap dimensi, terkait dengan aspek-aspek *governance* yang akan diukur; spesifikasi; keterkaitan dengan *outcome* pembangunan; lingkup data antardaerah dan antarwaktu; metode dan teknik pengumpulan data; serta kualitas data yang terkumpul. Faktor-faktor inilah yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun basis data bagi Indeks Pemerintahan.

Berikut ini uraian mengenai karakteristik dari tiap indikator Indeks Pemerintahan berbasis *governance* yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat.

3.1 Partisipasi Warga (*Citizen Participation*)

Partisipasi warga menjadi indikator dalam menilai kadar tata kelola pemerintahan karena konsep ini menggambarkan esensi dari penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi

sebagai paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki banyak model, antara lain yang bercorak model perwakilan, model deliberatif, bahkan model komunitarian. Pada prinsipnya, keseluruhan varian atau model demokrasi yang berkembang berfokus pada perluasan ruang partisipasi publik secara substantif untuk turut berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis.

Demokrasi secara substantif menghendaki adanya keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat karena dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain, dengan adanya partisipasi masyarakat, maka kadar legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan karena partisipasi biasanya sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi akan muncul manakala ada keterbukaan dan partisipasi akan menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, yang senantiasa diarahkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan konsepsi tersebut, maka partisipasi publik didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik, seperti penyusunan rencana pembangunan (musrenbang), pemilihan umum, atau pemilihan lokal. Umumnya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik dapat diobservasi di level pemerintahan terendah, yang mencakup baik partisipasi pasif maupun aktif dari masyarakat yang bermukim dalam suatu wilayah. Partisipasi aktif maupun pasif

diperoleh datanya dari data primer melalui kuesioner yang disebarkan pada responden rumah tangga.

Selain berupa data primer, pengukuran tingkat partisipasi juga dapat diukur melalui data sekunder berupa data jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM dalam suatu periode tertentu. Data ini dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, meskipun potensi biasnya cukup besar karena bertambahnya jumlah ormas dan LSM belum tentu mengindikasikan peningkatan partisipasi karena bisa saja organisasi-organisasi tersebut terbentuk bukan secara otonom dari masyarakat.

Kemampuan pemerintah provinsi memenuhi hak-hak politik warga merupakan kriteria penting untuk menilai kinerja tata pemerintahan. Terlebih lagi dalam masa pergeseran menuju terbentuknya sebuah ”negara demokratis”, maka penghormatan atas hak-hak politik dan HAM warga negara merupakan dimensi yang sangat esensial. Dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional 2004-2009 ialah ”mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis”. Meski dalam kenyataan tonggak-tonggak menuju negara demokratis telah ditancapkan; seperti adanya pers yang bebas, kebebasan untuk membentuk partai politik, penghapusan dwifungsi tentara, pemisahan polisi dari tubuh TNI, dihapuskannya fraksi TNI/ Polri di DPRD dan DPR, masuknya klausul HAM dalam UUD ’45 hasil amandemen, namun dalam praktik

penyelenggaraan pelayanan publik prinsip penghargaan terhadap hak-hak politik warga ini perlu diuji implementasinya.

Sementara itu, sasaran ketiga dari agenda ”mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis” dari dokumen RPJMN ialah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik. Adapun sasaran keempat ialah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari : 1). Berkurangnya praktik korupsi di birokrasi, 2). Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan berwibawa, 3). Hapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, dan 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Pemenuhan hak-hak politik warga diukur dari indikator diterapkannya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan kesediaan pemerintah mendengarkan dan merespon keluhan, ketidakpuasan, usul dan saran dari warga (terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik) dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka salahsatu indikator dalam pengukuran Indeks Pemerintahan adalah *citizen participation* (partisipasi warga) untuk mengukur partisipasi warga, dengan tolok ukur:

a. Kebebasan politik : mengukur kemampuan warga untuk mempengaruhi kualitas tata pemerintahan yang mereka peroleh.

b. Stabilitas politik : mengukur kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

3.2 Orientasi Pemerintah (*Government Orientation*)

Indikator ini mengukur sejauhmana pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan optimal, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara umum, fungsi pemerintahan mencakup fungsi regulasi, fungsi pembangunan/pemberdayaan, dan fungsi pelayanan publik. Ketiga ini akan optimal bila didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik dari sisi sumberdaya manusia, dana, maupun sarana dan prasarana. Keseluruhan sumberdaya ini perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar kualitas pelayanan publiknya bisa semakin meningkat. Di sisi lain, kinerja pemerintah daerah juga diukur dari kapasitasnya untuk menegakan hukum. Fungsi penegakan hukum ini diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada figur-figur otoritas (pemegang kewenangan).

Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salahsatu indikator untuk mengukur netralitas pemerintahan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi. Dalam sebuah negara hukum yang berwatak demokratis, mengandaikan dijalankannya asas kedudukan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka hukum (*equality before the law*). Secara

teoritis fungsi pokok hukum ialah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib, sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai (Soekanto, 1976 : 49). Dalam kenyataannya, hukum adalah produk dari proses politik. Produk hukum merupakan kristalisasi dan kompromi atas kepentingan-kepentingan politik dari berbagai kekuatan dalam masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik yang ada dalam masyarakat mempengaruhi secara kuat atau menentukan watak produk hukum dan praktik penegakan hukum (Mahfud, 1998). Dengan demikian, proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh siapa yang sedang berkuasa dan bagaimana watak atau sistem kekuasaan yang berkembang atau dikembangkan di suatu wilayah.

Kemampuan pemerintah mengendalikan korupsi merupakan kriteria mendasar untuk menilai kinerja tata pemerintahan. Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa antara tahun 1996-2002 beberapa indikator tata pemerintahan di Indonesia mengalami kemerosotan, yang paling menyolok ialah kemampuan dalam mengendalikan korupsi, yaitu dari posisi di angka 36 pada 1996, menjadi 7 pada 2002 (World Bank, 2004). Sementara itu pada tingkat internasional Indonesia tetap berada pada peringkat ke-5 negara terkorup di dunia, baik pada tahun 2005 maupun 2006 (*Tempo*, 29 Oktober 2006). Hasil penelitian Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia tahun 2001 menunjukkan bahwa korupsi tidak saja memakan sebagian besar penghasilan orang miskin, tetapi orang miskin juga membayar suap

lebih banyak ketika berobat di rumah sakit pemerintah, kantor catatan sipil, dan kantor Badan Pertanahan Nasional (Malik, 2006).

Berdasarkan asumsi tersebut, maka indikator *government orientation* (orientasi pemerintah) dimaksudkan untuk mengukur keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik (penyediaan barang dan jasa publik), dengan tolok ukur:

a. Efisiensi yudisial/penegakan hukum
b. Efisiensi birokrasi
c. Tingkat korupsi.

3.3 Pembangunan Sosial (*Social Development*)

Indikator ini merupakan alat ukur untuk menganalisis sejauhmana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam paradigma pembangunan yang berkelanjutan, kualitas pembangunan diukur dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dalam pengukuran indeks pemerintahan berbasis *governance*, indeks komposit IPM tetap digunakan dengan modifikasi indikator untuk bidang ekonomi, berupa indeks kemiskinan dan indeks kesenjangan. Keduanya digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam bidang ekonomi, yang juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan.

Tolok ukur distribusi pendapatan merujuk pada persoalan seberapa jauh pendapatan terdistribusikan secara merata di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka salahsatu indikator dalam pengukuran Indeks Pemerintahan adalah *social development* (pembangunan sosial), dengan tolok ukur:

a. Indeks Pembangunan Manusia
b. Distribusi pendapatan

3.4 Pengelolaan Ekonomi (*Economic Management*)

Indikator ini berupaya mengukur sejauhmana birokrasi pemerintah daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Isu kapasitas fiskal daerah berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggali potensi sumberdaya daerah sebagai penghasil keuangan daerah. Namun, perlu dipahami bahwa otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi lebih pada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kapasitas fiskal daerah juga perlu diukur dari proporsi penggunaan APBD agar tidak lebih banyak digunakan untuk kepentingan internal birokrasi.

Isu pertumbuhan investasi yang menjadi salahsatu tolok ukur bukan sekedar menunjuk pada persoalan dinamisasi perekonomian tapi juga transformasi gaya hidup masyarakat. Dalam kaitan otonomi penting untuk dicermati; apakah tata kelola pemerintahan daerah meningkatkan biaya-biaya investasi atau sebaliknya; apakah otonomi memunculkan perda-perda baru bermasalah atau

sebaliknya; apakah otonomi menjadikan masyarakat semakin produktif atau sebaliknya.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka salahsatu indikator dalam pengukuran Indeks Pemerintahan adalah *economic management* (pengelolaan ekonomi) yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian diukur melalui indikator kinerja yang mencakup kebijakan fiskal; kebijakan moneter; dan kebijakan perdagangan. Tolok ukurnya:

a. Tingkat investasi.
b. Kapasitas fiskal daerah.

Data sekunder untuk *input* pengukuran keempat indikator Indeks Pemerintahan dapat bersumber dari dokumen-dokumen:

1. Dalam Angka (Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Basis data pembangunan.
3. Statistik investasi daerah.
4. Data sektoral yang terkait, misalnya yang ada pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dll.

Untuk memenuhi kebutuhan data bagi Indeks Pemerintahan dan IPM, maka Badan Pusat Statistik (BPS) dapat melakukan pengumpulan data yang diperlukan oleh tiap indikator sebagai data sekunder. Selain data sekunder yang secara rutin diolah oleh BPS seperti Dalam Angka, Suseda, Susenas, Sakerda, Basis Data Pembangunan, dll., BPS juga perlu mengolah data yang terkait dengan partisipasi politik, misalnya data tentang keikutsertaan dalam partai politik; organisasi kemasyarakatan; dll. Data mengenai

korupsi juga masih agak sulit diperoleh, padahal data ini diperlukan sebagai basis data untuk pengukuran Indeks Pemerintahan. Di masa mendatang, data mengenai kasus-kasus dan ranah terjadinya korupsi dapat disediakan oleh BPS atau pengadilan setempat, sehingga memudahkan dalam pengukuran Indeks Pemerintahan.

Sementara untuk data primer, secara rutin dapat dilakukan survei Indeks Pemerintahan dengan menggunakan kuesioner yang menghasilkan data persepsi. Data primer dan sekunder ini menjadi basis data yang dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik untuk kepentingan perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan, evaluasi sinergitas tata kelola pemerintahan, dll.

BAB IV

HASIL UJI TERAP PENGUKURAN INDEKS PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Pertama-tama yang akan dihitung adalah nilai (indeks) governance untuk masing-masing variabel, kemudian baru menghitung agregatnya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1

Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007

No	Variabel	Nilai
1	Partisipasi publik (*citizen participation*)	63.71429
2	Orientasi pemerintah (*government orientation*)	54.67574
3	Pembangunan sosial (*social development)*	58.29365
4	Pengelolaan ekonomi (*economic management*)	59.84127
5	Indeks Pemerintahan	58.57048

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa kualitas *governance* (indeks pemerintahan) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 20007 berdasarkan penilaian responden adalah sebesar 58.57. Bila merujuk pada tipologi kualitas *governance* yang dikembangkan *The Urban Governance Initiative* (TUGI) yang membuat tipologi berikut:

Tabel 4.2

Tipologi Kualitas Governance Model TUGI

Grade	Makna
85 – 100	Sangat Baik
65 – 84	Baik (Tetapi masih memiliki kesempatan untuk ditingkatkan)
50 -64	Cukup (Dapat Melakukan Lebih baik lagi)
35 – 49	Buruk (Dibutuhkan komitmen dan upaya yang lebih besar lagi)
0 – 35	Sangat Buruk (Ada sesuatu yang salah dalam penyelenggaraan governance di tempat itu)

Maka kualitas *governance* di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 sebesar 58,57 masuk ke dalam kategori Cukup. Sedangkan bila kita lihat untuk masing-masing variabel *governance* maka nilai terendah (54.68) diperoleh oleh variabel orientasi pemerintah (*government orientation*) sedangkan nilai tertinggi (63.71) adalah variabel partisipasi publik (*citizen participation*).

Tabel 4.3
Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007 Berdasarkan Kelompok Responden

No	Unsur Responden	Variabel Governance				
		CP	GO	SD	EM	Total
1	*Government*	66.67	55.24	60.56	68.52	62.75
2	Dunia Usaha (*Market*)	54.17	54.13	56.11	62.22	56.66
3	*Civil Society*	65.03	54.90	57.89	59.03	59.21

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Bila kita perhatikan tabel tersebut, terdapat perbedaan di antara *well-informen persons* dalam menilai *governance*, seperti dugaan semula unsur pemerintah akan memberikan penilaian yang lebih tinggi dan penilaian terendah diberikan oleh kalangan dunia usaha (pasar).

Pemerintah menilai variabel pengelolaan ekonomi (EM) sebagai unsur *governance* yang memiliki nilai tertinggi dan variabel orientasi pemerintah (OG) mendapat penilaian paling rendah. Demikian pula bagi kalangan dunia usaha bahwa variabel pengelolaan ekonomi (EM) sebagai unsur *governance* yang memiliki nilai tertinggi dan variabel orientasi pemerintah (OG) mendapat penilaian paling rendah. Namun berbeda dengan dua kelompok ini kalangan *civil society* menilai variabel partisipasi publik (CP) sebagai unsur *governance* yang memiliki nilai tertinggi sedangkan variabel orientasi pemerintah (OG) juga mendapat penilaian paling rendah.

BAB V

ANALISIS PRAKTIK PEMERINTAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN HASIL UJI TERAP INDEKS PEMERINTAHAN

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan yaitu berkenaan dengan hubungan antara ketiga pilar *governance* yaitu pemerintah, pelaku usaha (pasar) dan *civil society* serta yang berkenaan dengan isu-isu strategis yang harus ditangani agar tercipta sinergitas antara ketiga unsur tadi, didapatkan hasil sebagai berikut.

5.1 Kalangan Akademisi

Hubungan koordinatif baru sebatas pada tindakan-tindakan yang temporer, seharusnya koordinasi harus berjalan secara terencana dan proporsional. Secara umum, responden dari perguruan tinggi menyatakan bahwa hubungan antara unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat belum sinergis. Dalam banyak hal, publik justru sering berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dan terkesan cenderung masih bersifat seremonial. Kondisi tersebut tercipta karena pemerintah lebih memposisikan dirinya berada di atas pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh rapuhnya kordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain: penanganan PKL, pengelolaan sampah, pengelolaan lahan parkir, tumpang tindihnya proyek antara Pekerjaan Umum, PLN, Telkom, dan PDAM sehingga

senantiasa merugikan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Selain itu, dalam penyusunan Renstra, pemerintah dianggap kurang mengakomodir unsur masyarakat dan dunia usaha.

Permasalahan yang perlu ditangani dengans segera dalam rangka mensinergikan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat pemerintah, yaitu korupsi. Menurut kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, unsur pimpinan dalam pemerintah memerlukan keberanian untuk membersihkan diri maupun bawahannya dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pelayanan publik yang selama ini seolah-olah terabaikan oleh pemerintah. Sebagian kalangan dari perguruan tinggi juga menyarankan agar hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat hendaklah lebih terbuka dan dialogis. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan sarana media informasi yang terintegrasi, misalnya melalui jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan di mana data/informasi ditampilkan secara akurat dan selalu dperbaharui.

5.2 Kalangan Partai Politik (Parpol)

Kalangan parpol berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat cenderung bersifat koordinatif, belum sinergis. Kalangan parpol memang selalu mendapat undangan untuk merapatkan rancangan-rancangan pembangunan, namun terasa hanya formalitas belaka. Salah satu

kasus yang berkembang saat ini adalah tentang pembangunan di kawasan Bandung Utara, meskipun telah disepakati baik secara politik maupun dalam Perda, namun pada kenyataannya pembangunan di sana terus berlangsung dan bertolakbelakang dengan Perda. Menyikapi kondisi itu, masyarakat senantiasa dalam keadaan tidak berdaya. Pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha masih bersifat seremonial, misalnya anggaran APBD untuk pengembangan pelaku usaha cukup tinggi namun pada kenyataannya hasil hampir tidak nampak.

Dalam rangka mensinergikan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat kalangan dari Parpol pada umumnya menyarankan agar pemerintah memperbaiki sikap mental birokrat sekaligus meningkatkan kinerja aparatur negara. Prosedur birokratis perlu dipangkas untuk memudahkan kalangan pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan usahanya. Transparansi APBD perlu segera dilaksanakan karena pada hakikatkan APBD adalah dokumen publik dan perlu diketahui oleh publik sehingga publik mengetahui alokasi anggaran yang secara langsung diperuntukan bagi kepentingan publik. Hal ini mempengaruhi proses penegakan hukum dan juga menandakan pengelolaan administrasi yang tidak sehat. Kalangan parpol juga menyoroti sikap kalangan pelaku usaha yang sering tidak acuh terhadap masyarakat sekitarnya, dalam hal ini mereka menyarankan agar kepedulian pelaku usaha terhadap masyarakat sekitarnya ditingkatkan. Di sisi lain, pihak pemerintah juga perlu menjamin regulasi-regulasi yang berlaku agar konsisten

diberlakukan, hal ini terkait langsung dengan kepastian ilkim usaha bagi para pelaku usaha.

5.3 Kalangan Organisasi Nonpemerintah

Kalangan LSM secara umum berpandangan bahwa hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan pelaku usaha cukup baik, karena didasari oleh kepentingan besar dari masing-masing mereka. Sedangkan unsur masyarakat, dalam banyak hal terkesan sebagai pelengkap semata. Dengan ungkapan yang lebih tegas, kalangan LSM menyebut hubungan antar pihak-pihak tersebut belum sinergis dan mencurigai hubungan yang terlalu harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha yang merugikan publik. Sebagian responden dari kalangan LSM cenderung mengartikan pelaku usaha untuk menunjuk pada para investor besar yang selama ini tindakan-tindakan mereka banyak yang bertentangan dengan semangat kalangan LSM yang mengedepankan kepentingan publik.

Untuk mensinergikan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kalangan LSM menuntut agar pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa persoalannya, antara lain pembentukan Perda sedemikian rupa agar hasilnya mampu dirasakan oleh segenap masyarakat, penanganan masalah Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas), pengaturan wilayah-wilayah untuk para investor, serta pembenahan sistem pelayanan. Khusus pembenahan di bidang pelayanan, disarankan agar pemerintah mulai memberlakukan sistem pelayanan satu atap di semua bidang pelayanan publik. Di

pihak pelaku usaha, mereka patut untuk melangkah lebih bijaksana dan mematuhi segala etika dalam berusaha sehingga tidak merugikan pihak masyarakat. Di sisi lain, masayrakat pun harus berusaha untuk bekerja sebaik mungkin dan senantiasa berada dalam jalur peraturan yang berlaku.

Beberapa responden dari LSM keagamaan menganggap telah terjadi diskriminasi dalam proses kehidupan sosial ekonomi di Jawa Barat, salahsatu contohnya adalah diberlakukannya Perda-perda syariah. Kondisi tersebut membawa permasalahan kerukunan umat beragama, persoalan inilah yang menurut mereka sepatutnya mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Ketiga unsur, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat seyogyanya lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengadakan rembug yang membahas perbaikan kinerja mereka agar terjali hubungan yang sinergis. Pemerintah dan pelaku usaha sebaiknya lebih seksama lagi dalam memahami kehidupan masyarakat akar rumput agar secara bersama-sama dapat memberikan solusi bagi kemajuan kehidupan bersama.

5.4 Kalangan Pelaku Usaha (Pasar)

Responden dari kalangan pelaku usaha pada umumnya menyatakan bahwa antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat telah terjalin hubungan yang kordinatif, dimana keadaan saat ini dirasakan lebih baik dari periode sebelumnya. Akan tetapi, hubungan tersebut belum bisa dikatakan sinergis. Hal ini disebabkan masih adanya kerancuan diantara hubungan berbagai pihak, antara

lain pihak pemerintah yang terkesan mengeksploitasi pihak pelaku usaha. Pelaku usaha juga terkesan mengeksploitasi masyarakat atau kaum pekerja. Sedangkan masyarakat selalu diposisikan sebagai obyek dalam pembangunan. Kalangan pelaku usaha kecil sering kali merasa diperlakukan secara tidak adil dalam regulasi sistem usaha, contohnya, semakin tersisihnya para pedagang tradisional karena perkembangan pasar modern yang bergitu pesat dan mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah kurang adil dalam memberlakukan regulasi, sehingga banyak pelaku usaha kecil yang gulung tikar.

Permasalahan yang perlu segera ditangani untuk mewujudkan sirergitas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah membenahi saluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Selama ini, masih banyak hambatan dalam penyaluran aspirasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, lembaga legislatif perlu berbenah diri untuk lebih bersifat pro publik, dengan kata lain bahwa mereka harus menjamin singkronnya aspirasi dari masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan.

5.5 Kalangan Pers

Kalangan pers merasa hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat hanya bersifat koordinatif, tidak sampai pada siregitas. Hubungan kordinatif ini juga hanya dalam tatanan konseptual saja, tidak sesuai dengan yang terjadi di tatanan praktis. Beberapa responden menyoroti kasus Kawasan Bandung Utara

sebagai contoh lemahnya sinegritas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dari kasus tersebut juga tergambarkan dengan jelas ketidaksingkronan diantara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum. Kasus lain yang mendapat keprihatinan dari reponden pers adalah tidak adanya perlindungan bagi pedangan pasar tradisional, lemahnya perlindungan terhadap kaum buruh dan guru, penanganan permasalahan sampah yang belum mencapai titik temu antara provinsi dengan kota, serta pengelolaan anggaran yang masih belum berpihak kepada publik.

Sebagian responden kalangan pers juga menyatakan bahwa tingkat koordinasi antara pemerintah juga perlu ditingkatkan, misalnya dalam penanganan masalah bencana. Ketika bencana terjadi di Jawa Barat, masyarakat selalu terlambat mendapatkan pertolongan secara menyeluruh, karena pihak pemerintah lemah dalam mengkordinasikan pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana. Contoh lain adalah tidak kordinatifnya aparat pemerintah antar SKPD. Sering kali masyarakat bingung dengan berbagai kebijakan yang dalam pelaksanaannya tidak singkron akibat tumpang tindihnya kewengangan antar SKPD.

Untuk memperbaiki sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, hal pertama yang perlu dilakukan adalah singkronisasi perangkat hukum sehingga tidak ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus lebih sering duduk bersama, terutama ketika merumuskan

Perda-perda yang mengatur dunia usaha. Sebab, perda-perda ini dikemudian hari akan sangat memberikan dampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Sehingga, benturan-benturan kepentingan suatu saat bisa diminimalisir.

Pada sisi lain, kalangan pers meminta agar pemerintah atau lebih spesifiknya, birokrat, tidak alergi mendapatkan kritik dari pers. Karena, pers hanya menjalankan fungsi sebagai penyeimbang hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah disarankan untuk lebih membuka diri dan sering terlibat dalam rembug baik dengan pihak pelaku usaha maupun dengan masyarakat. Selain itu, ruang publik yang ada juga perlu diperluas untuk menjaring aspirasi dalam penentuan kebijakan, karena masih rendahnya peran publik dalam memberikan kontribusi lahirnya kebijakan.

Penyediaan fasilitas publik yang lebih baik dan sepadan dengan alokasinya dalam APBD, penyediaan akses monitoring anggaran, rencana pembangunan, dan hasilnya kepada masyarakat, serta pembelaan yang tegas terhadap kaum buruh merupakan poin-poin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah demi terwujudnya kondisi yang harmonis.

5.6 Kalangan Tokoh Masyarakat

Hubungan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saat ini dirasakan belum dapat dikatakan sinergis. Masih terdapat ketidaksinambungan dalam program-program pemerintah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha pelaku usaha

dan masyarakat. Sebagian responden memberi contoh pemberian pinjaman dana kepada kelompok usaha kecil (UKM/mikro) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produktifitasnya. Namun, setelah produksi meningkat kendala berikutnya adalah mengenai pemasaran, di sinilah pemerintah seharusnya turut membantu, karena tahap ini merupakan langkah strategis bagi pengembangan UKM tersebut.

Langkah untuk membantu usaha kecil dan menengah antara lain dengan memfasilitasi pemasaran hasil produksi baik terhadap pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri. Hampir senada dengan responden lainnya, para tokoh masyarakat yang dijadikan responden dalam kajian ini menyatakan bahwa unsur birokrasi pemerintahan di Jawa Barat perlu direformasi Karena, selama ini kultur birokrasi masih menjadi kendala dalam upaya perbaikan pelayanan publik terhadap warga masyarakat.

Upaya mensinergikan unsur pemeirntah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka keselarasan pembangunan di Jawa Barat harus dimulai dengan dibukanya jalur komunikasi yang intens di antara berbagai unsur tersebut.

5.7 Kalangan Tokoh Agama

Para tokoh agama yang dijadikan reponden pada umumnya berpandangan bahwa hubungan sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat belum terjalin. Hubungan antar unsur tersebut baru terjalin secara kordinatif yang didasarkan pada kepentingan tertentu saja. Seharusnya terdapat suatu konsensus

dan komitmen yang kuat dari masing-masing pihak untuk menjadikan Jawa Barat kondusif dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Beberapa tokoh agama menyoroti tentang tingginya pajak bagi para pelaku usaha yang disertai maraknya pungutan liar telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Sehingga, kondisi ini semakin membuat warga masyarakat dirugikan. Tidak sinerginya hubungan koordinatif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terlihat dari kasus gagalnya pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan bahan-bahan pokok, seperti minyak goreng.

Untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, para tokoh agama menyarankan agar membereskan permasalahan korupsi terlebih dahulu. Kehidupan berdasarkan pada uang semata-mata hanya melahirkan budaya kerja yang koruptif. Demikian pula dengan jalur birokrasi pemerintahan yang terlalu panjang dan berbelit-belit, turut menyebabkan lahirnya budaya korupsi di lingkungan pemerintah. Di samping itu, panjangnya jalur birokrasi juga telah merugikan masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas pelayanan publik. Untuk itu, responden dari tokoh agama menyarankan agar jalur birokrasi diperpendek sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Memprioritaskan kepentingan rakyat seharusnya sudah menjadi visi misi yang tertanam dalam jiwa puhak pemerintah dan pelaku usaha.

5.8 Kalangan Pemerintah (*Government*)

Secara umum, aparat pemerintah yang dijadikan responden dalam kajian ini mengakui bahwa hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat hanya bersifat koordinatif, belum sampai pada bentuk yang sinergis. Beberapa dari responden pun menyatakan bahwa selama ini, pemerintah masih dominan dalam pembuatan rumusan pembangungan di Jawa Barat, sedangkan masyarakat masih berperan sebagai obyek dalam pembangunan. Seharusnya, pemerintah mengoptimalkan peranannya sebagai fasilitator, dan memberikan peranan yang lebih besar kepada warga masyarakat untuk turut bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pembangunan.

Aparat pemerintah yang dijadikan responden berpandangan bahwa para pelaku usaha belum memiliki hubungan yang sinergis dengan masyarakat. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman akan konsep *corporate social responsibility* dan program kemitraan bina lingkungan dari BUMN. Apabila beberapa program tersebut telah difahami oleh kedua belah pihak serta dijalankan dengan sebaik mungkin, maka akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlu adanya suatu sistem pengelolaan informasi yang efektif. Dalam artian, semua pihak, baik pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah itu sendiri memiliki akses yang mudah untuk memberikan, mengakomodir, dan menyebarkan informasi kepada semua khalayak. Misalnya, setiap perencanaan ataupun perumusan produk hukum senantiasa disosialisasikan di tingkat masyarakat melalui berbagai media

informasi. Kemudian, pelaku usaha dan warga masyarakat dapat mengomentari, memberi pendapat, dan masukannya terhadap produk hukum yang akan dirumuskan. Langkah ini sebagai upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan persoalan publik, sekaligus mengantisipasi agar tidak terjadi terjadi kerancuan-kerancuan produk hukum jika sudah disahkan. Sedangkan dalam proses penyusunan suatu perencanaan atau produk hukum, seyogyanya para pelaku usaha dan masyarakat juga lebih dilibatkan. Selama ini, penyusunan Renstra Provinsi Jawa Barat dirasakan kurang melibatkan kedua unsur tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami regulasi yang diberlakukan dan turut berperan aktif dalam pelaksanaannya.

BAB VI

PENUTUP

Upaya yang sistematis, komprehensif dalam pengukuran empiris terhadap kualitas *governance* dalam lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang relatif baru. Di Indonesia pengukuran *governance* pernah dilakukan ketika UU No. 22 Tahun 1999 baru diberlakukan. Pengukuran ini dilaksanakan dalam bentuk *Governance and Decentralization Surveys* (GDS) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di sekitar 177 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Model pengukuran governance juga pernah dibuat oleh tim Bappenas (Tim pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik-Bappenas), namun model yang dibuat Bapenas baru sampai pada perumusan indikator-indikator governance tetapi belum sampai pada tahap operasional.

GDS melakukan pengukuran indeks *governance* untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi. Sementara Uji Terap Pengukuran *Governance* di Jawa Barat tahun 2007 ini melakukan penilaian kualitas governance untuk tingkat provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan atau urusan pemerintah daerah, maka ketika akan menilai kualitas *governance* pada tingkat pemerintah provinsi harus dipahami secara jelas mana saja kewenangan atau urusan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sehingga penilaian

governance menjadi objektif dan valid. Uji Terap Pengukuran *Governance* di Jawa Barat pada tahun 2007 oleh karenanya berbeda dengan GDS tahun 2002. Perbedaan ruang lingkup kajian memberi konsekuensi pada penentuan indikator *governance* yang dianggap relevan dengan konteks pemerintah provinsi.

Uji terap ini sebenarnya merupakan upaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang telah membuat model pengukuran *governance* untuk tingkat provinsi. Model ini berbasis pada data sekunder, karena penilaian *governance* dihasilkan melalui model formal yang diadopsi dari model yang dikembangkan oleh Huther dan Shah (1998). Keduanya mengukur kualitas *governance* dengan menggunakan metode *principal component analysis* (PCA). Pada model ini terdapat kendala yang terkait dengan ketersediaan data sekunder yang memadai untuk menjadi *input* data untuk tiap-tiap indikator *governance*, persoalan keterbatasan data ini memang khas dialami oleh penelitian di Indonesia karena basis data yang ada seringkali tidak relevan. Untuk itu model tersebut dilengkapi dengan model pengukuran *governance* yang berbasis data primer yang diperoleh melalui survei.

Kendala yang dihadapi dalam uji terap pengukuran *governance* di Jawa Barat tahun 2007 ini adalah membentuk persepsi awal yang sama dari para *well-informed persons* tentang *governance* dalam konteks pemerintah provinsi. Kendala selanjutnya adalah apabila penelitian ini ingin melakukan generalisasi maka secara metodologis diperlukan syarat-syarat lain yang lebih ketat, diantaranya menyangkut sampling responden.

Secara keseluruhan model pengukuran *governance* ini dapat dioperasionalkan untuk mengukur kualitas *governance* suatu pemerintahan. Meskipun sebagaimana layaknya bahwa dalam survei yang bersifat *perception-based* terdapat unsur subjektivitas, namun dengan menggunakan konsep *well-informed persons* subjektivitas tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan bias berarti bagi tujuan penelitian. Diakui bahwa penelitian ini secara statistik tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi karena memang penelitian ini lebih bertujuan untuk melakukan uji terap model pengukuran *governance*, untuk itu disarankan dilakukan survei yang lebih luas lagi yang melibatkan *stakeholders* yang lebih besar.

Meskipun secara metodologis hasil penelitian ini cenderung bersifat indikatif ketimbang konklusif (*indicative rather than conclusive*), hasil uji terap ini menghasilkan beberapa isu menarik sebagaimana terungkap pada hasil analisis dari proses penilaian *governance*. Hasil analisis terhadap hubungan antar-*stakeholders* yang terungkap dari hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa relasi *governance* belum sinergis karena rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*) antar-*stakeholders*. Relasi yang berimbang dalam nuansa kemitraan juga belum dirasakan oleh para responden karena masih ada kalangan yang merasa dieksploitasi oleh kalangan lain atau hanya dimanfaatkan peran sertanya untuk justifikasi kebijakan pemerintah. Di masa mendatang, perlu ada upaya yang komprehensif untuk membenahi relasi antar-*stakeholders* ini agar lebih sinergis. Kepercayaan sebagai landasan dari relasi *governance* perlu dibangun melalui penegakan hukum, peningkatan kinerja

birokrasi pemerintah, serta pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas. Ketiganya merupakan bagian dari indikator orientasi pemerintah yang menurut persepsi para *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha, dan *civil society*) tergolong rendah. Karena itu, upaya pembenahan relasi *governance* diarahkan untuk memperbaiki orientasi pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2001. *Kompilasi Bahan-bahan Diskusi Rutin Public Good Governance*. Jakarta : Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas.

Duncan, Ronald, Teuea Toatu, dan Azmat Gani. 2004. *A Conceptual Framework for the Development of a Composite Governance Index for the Pacific Island Countries*. Pacific Institute of Advanced Studies in Development and Governance.

Huther, Jeff and Anwar Shah. 1998. *Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization*. Washington, DC : World Bank.

Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Labaton. 1999. *Agregating Governance Indicators*. Washington, DC : World Bank.

Kooiman, Jan (ed). 1993. *Modern Governance : New Government-Society Interactions*. London, Newbury Park, New Delhi : Sage Publications.

Manning, N., R. Mukherjee, dan O. Gokcekus, 2000. *Public Officials and their Institutional Environment.* Washington, D.C : World Bank.

Mishra, Satish Chandra. 2000. *The Economic and Politics of Good Governance : Notes Towards an Anatomy*. Makalah. Jakarta : Bappenas.

Soehardono, Edy. 2001. *Good Governance : Untuk Daulat Siapa ?*. Yogyakarta : Forum LSM DIY bekerja sama dengan YAPPIKA.

Syaukani (dkk). 2002. *Otonomi dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wanandi, Jusuf. 1999. *Good Governance dan Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan : Agenda Masa Depan*. Jurnal Analisis Tahun XXVII No. 3.

LAMPIRAN

PENGANTAR

Responden yang kami hormati,

Kuesioner ini merupakan instrumen dari kegiatan uji terap dalam rangka pengukuran **Indeks Pemerintahan** (*Governance Index*) bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007.

Tujuan dari Uji Terap Pengukuran Indeks Pemerintahan ini adalah untuk mengetahui persepsi warga terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aspek *governance*, hasilnya akan menjadi *feed back* dan bahan evaluasi guna meningkatkan pelayanan kepada publik dalam rangka mewujudkan *good governance* di Jawa Barat.

Ibu/Bapak diminta untuk memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan cara menjawab sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda (*multiple-choice*), di mana seluruh pertanyaan harus dijawab dengan lengkap. Jawaban Ibu/Bapak merupakan refleksi dari pengalaman dan persepsi Ibu/Bapak terhadap penyelenggaraan *governance* di Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam instrumen ini tidak dapat menangkap dan menggambarkan seluruh kompleksitas yang ada dalam isu-isu *governance*, oleh karena itu sebagai tambahan bagi instrumen ini kami memohon kiranya Ibu/Bapak dapat memberikan catatan/komentar tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai situasi dan kondisi *governance* di Jawa Barat. Bapak/Ibu juga dipersilahkan memberikan komentar apabila ada hal-hal lain yang dianggap penting dan signifikan dalam penyelenggaraan *governance* di luar indikator-indikator yang tersirat dalam kuesioner.

Responden dalam survei ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang mendalam (*Well-Informed Persons* atau WIPs) mengenai *governance* dan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga mereka dapat memberikan jawaban atau penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dimensi-dimensi *governance*.

Identitas responden tidak akan dipublikasikan dan informasi yang termuat dalam kuesioner semata-mata digunakan untuk keperluan riset ilmiah.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah
Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran
Kepala,

Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si.
NIP 131 760 499

I. DATA RESPONDEN

1. Nama : _____

2. Jabatan : _____

3. Unit kerja : _____

4. Alamat/Nomor HP : _____

II. PERSEPSI

Berilah tanda silang (X) di kolom Tingkat Penilaian untuk setiap pernyataan sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu. Semakin tinggi angka yang diberikan, maka semakin tinggi/baik persepsi Bapak/Ibu terhadap pernyataan/unsur yang dinilai.

No	Pernyataan	Tingkat penilaian				
Bagian I: Partisipasi Warga (*Citizen Participation*)						
1.	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan seperti APBD, program dan proyek pembangunan, serta perda	1	2	3	4	5
2.	Ada kebebasan berekspresi yang luas bagi masyarakat	1	2	3	4	5
3.	Masyarakat dapat melakukan aktivitas berkelompok, berorganisasi tanpa ada rasa ketakutan akan adanya pencekalan	1	2	3	4	5
4.	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada publik tidak bersifat diskriminatif	1	2	3	4	5
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi terjadinya diskusi publik yang terkait dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	2	3	4	5
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering mengundang unsur non pemerintah dalam pembuatan kebijakan pemerintah	1	2	3	4	5
7.	Warga dapat mempengaruhi kualitas tata pemerintahan yang mereka peroleh	1	2	3	4	5
8.	Stabilitas politik di wilayah provinsi Jawa Barat dapat menjamin kebebasan berusaha dan tumbuh kembangnya perekonomian di wilayah ini	1	2	3	4	5
9.	Konflik di level elit sering muncul	1	2	3	4	5
10.	Konflik di level massa sering muncul	1	2	3	4	5
11.	Konflik antara pemerintah dan masyarakat sering muncul	1	2	3	4	5
12.	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha sering muncul	1	2	3	4	5
13.	Masyarakat percaya pada institusi/lembaga pemerintah	1	2	3	4	5
14.	Masyarakat percaya pada figur pemerintah	1	2	3	4	5
BAGIAN II: Orientasi Pemerintah (*Government Orientation*)						
15.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat memperbaiki iklim investasi	1	2	3	4	5
16.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat memperbaiki efektivitas penegakan hukum	1	2	3	4	5
17.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas sosial	1	2	3	4	5
18.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik	1	2	3	4	5

No	Pernyataan	Tingkat penilaian				
19.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat memberdayakan usaha kecil dan menengah	1	2	3	4	5
20.	Perda-perda di Provinsi Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN di lingkungan pemerintahan	1	2	3	4	5
21.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten dalam menegakan aturan-aturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaran pemerintahannya	1	2	3	4	5
22.	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat efisien	1	2	3	4	5
23.	Struktur organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1	2	3	4	5
24.	Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kebutuhan nyata	1	2	3	4	5
25.	Kompetensi aparatur birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan bidang kerjanya	1	2	3	4	5
26.	Proporsi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggambarkan orientasinya pada pelayanan kepada masyarakat	1	2	3	4	5
27.	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan aparat pemerintah	1	2	3	4	5
28.	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan anggota DPRD	1	2	3	4	5
29.	Kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan sudah efektif	1	2	3	4	5
30.	Sarana penyampaian keluhan dalam pelayanan publik sudah efektif	1	2	3	4	5
31.	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	2	3	4	5
32.	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif di tingkat Provinsi Jawa Barat	1	2	3	4	5
33.	Dunia usaha/pasar mendorong terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	2	3	4	5
34.	Praktik pemberian “biaya tambahan” di luar biaya resmi dalam pelayanan publik masih sering terjadi	1	2	3	4	5
35.	Praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah efektif	1	2	3	4	5
BAGIAN III: Pembangunan Sosial (*Social Development*)						
36.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan di Jawa Barat sudah sesuai kondisi riil	1	2	3	4	5
37.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di bidang ekonomi di Jawa Barat sudah sesuai kondisi riil	1	2	3	4	5
38.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di bidang kesehatan di Jawa Barat sesuai kondisi riil	1	2	3	4	5
39.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan di Jawa Barat sesuai kondisi riil	1	2	3	4	5
40.	Distribusi pendapatan antarmasyarakat di Jawa Barat rendah	1	2	3	4	5
41.	Kesenjangan pembangunan antarwilayah terjadi di Jawa Barat	1	2	3	4	5
BAGIAN IV: Pengelolaan Ekonomi (*Economic Management*)						
42.	Investasi baik investasi asing maupun domestik di Jawa Barat tinggi	1	2	3	4	5
43.	Investasi Jawa Barat memiliki daya tarik bagi investor	1	2	3	4	5
44.	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi warga	1	2	3	4	5
45.	Kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendukung pelaksanaan pembangunan	1	2	3	4	5

No	Pernyataan	Tingkat penilaian				
46.	PAD memberikan kontribusi signifikan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	2	3	4	5
47.	Rasio antara biaya rutin dalam APBD terhadap pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai	1	2	3	4	5
48.	Rasio antara biaya belanja publik dalam APBD terhadap pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai	1	2	3	4	5
49.	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung iklim pengelolaan ekonomi	1	2	3	4	5
50.	Kinerja birokrasi mendukung pengelolaan ekonomi	1	2	3	4	5

III. PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah selama ini ada hubungan yang sinergis antara unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat? Ataukah hubungan tersebut baru sebatas koordinatif? (Mohon diberi contoh)

JAWABAN

2. Permasalahan apa saja yang perlu segera ditangani agar hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat?

JAWABAN

Terima Kasih atas Kerjasamanya

CODING SHEET PELAKU USAHA

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…	1	2	1			4
2	Ada kebebasan berekspresi…			1	3		4
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..			1	3		4
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …	1	1	2			4
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …	1	3				4
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …	1		3			4
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…		3	1			4
8	Stabilitas politik di wilayah ….		2	2			4
9	Konflik di level elit …	1		1	2		4
10	Konflik di level massa…			1	2	1	4
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…			1	3		4
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…			1	2	1	4
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		3			1	4
14	Masyarakat percaya kepada figur…		3			1	4
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…	1	3				4
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas	1	3				4
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..	1	2	1			4
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas	1	2	1			4
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…	1	1	2			4
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	2	2				4
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…	2	2				4
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	1	3				4
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…	1	3				4
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..		3	1			4
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		4				4
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		3		1		4
27	Alokasi APBD digunakan…			1	2	1	4
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..				3	1	4
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar	1	3				4
30	Sarana penyampaian keluhan…		4				4
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif			2	1	1	4
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif		1	1	2	1	5
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		2	3			5
34	Praktik pemberian biaya tambahan…	1			1	2	4
35	Praktek penegakan hukum…	1	2		1		4
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…		2	2			4
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …		2	2			4
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…		2	2			4
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	1	2	1			4
40	Distribusi pendapatan…		1	1	1	1	4
41	Kesenjangan pembangunan…		1		2	1	4
42	Investasi baik asing…		3	1			4
43	Investasi Jawa Barat….		3	1			4
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		3	1			4
45	Kapasitas PAD mendukung…	1	3				4
46	PAD memberikan kontribusi…		3	1			4
47	Rasio antara biaya rutin…		3	1			4
48	Rasio antara biaya belanja..	1	3				4
49	Kebijakan pemerintah…	1	2	1			4
50	Kinerja birokrasi mendukung…..		3			1	4

CODING SHEET PERGURUAN TINGGI

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…	2	3	2	1		8
2	Ada kebebasan berekspresi…			2	5	1	8
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..			3	5		8
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …		3	4	1		8
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …	1	3	3	1		8
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		6	1	1		8
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…	1	2	2	3		8
8	Stabilitas politik di wilayah ….		1	2	4	1	8
9	Konflik di level elit …		1	3	2	2	8
10	Konflik di level massa…			4	2	2	8
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…			5	2	1	8
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…		1	3	4		8
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		4	4			8
14	Masyarakat percaya kepada figur…		5	3			8
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		6	2			8
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		5	3			8
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..		6	2			8
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas	1	5	1	1		8
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…	1	5	2			8
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	2	2	4			8
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…	2	3	3			8
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	2	4	2			8
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…	1	4	3			8
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..	1	4	3			8
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		5	3			8
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		5	2	1		8
27	Alokasi APBD digunakan…		2	3	3		8
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..		1	3	3	1	8
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar	1	5	2			8
30	Sarana penyampaian keluhan…	1	6	1			8
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif		1	1	4	2	8
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif		2	2	4		8
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		1	4	3		8
34	Praktik pemberian biaya tambahan…			4	1	3	8
35	Praktek penegakan hukum…	2	3	2	1		8
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…	1	4	2	1		8
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …	1	3	3	1		8
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…	1	3	4			8
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	1	4	3			8
40	Distribusi pendapatan…		2	5	1		8
41	Kesenjangan pembangunan…		2	4	2		8
42	Investasi baik asing…		6	2			8
43	Investasi Jawa Barat….		2	3	3		8
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		2	4	2		8
45	Kapasitas PAD mendukung…	1	1	3	3		8
46	PAD memberikan kontribusi…			5	3		8
47	Rasio antara biaya rutin…		5	3			8
48	Rasio antara biaya belanja..		5	3			8
49	Kebijakan pemerintah…		2	4	2		8
50	Kinerja birokrasi mendukung…..	1	5	2			8

CODING SHEET PERS

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…	2	3	1	2	2	10
2	Ada kebebasan berekspresi…			4	4	2	10
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..			4	5	1	10
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …		3	1	4	2	10
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …	2	2	3	1	2	10
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		3	5	1	1	10
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…	2	4	1	1	2	10
8	Stabilitas politik di wilayah ….			6	3	1	10
9	Konflik di level elit …		1	2	4	3	10
10	Konflik di level massa…		1	2	5	2	10
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…		1	2	3	4	10
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…		1	2	4	3	10
13	Masyarakat percaya kepada institusi…	3	3	1	2	1	10
14	Masyarakat percaya kepada figur…	2	4	1	3		10
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		3	4	2	1	10
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas	1	4	2		3	10
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..	1	2	3	3	1	10
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas	1	3	3	2	1	10
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		4	4	1	1	10
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	3	3	3	1		10
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…	4	2	2	2		10
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	2	5	1	2		10
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…	2	4	3	1		10
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..	4	3	1	2		10
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..	3	3	3	1		10
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…	4		4	1	1	10
27	Alokasi APBD digunakan…	1	4	1	3	1	10
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..	1	3	2	3	1	10
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar	2	4	3	1		10
30	Sarana penyampaian keluhan…	4	2	3	1		10
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif	1	3	2	1	3	10
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif	1	2	2	2	3	10
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		3	6	1		10
34	Praktik pemberian biaya tambahan…		2	3	2	3	10
35	Praktek penegakan hukum…	5	3	1	1		10
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…	1	4	5			10
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …	2	3	5			10
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…	1	6	3			10
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	2	3	4	1		10
40	Distribusi pendapatan…	1	2	4	2	1	10
41	Kesenjangan pembangunan…		1	3	3	3	10
42	Investasi baik asing…		2	4	1	3	10
43	Investasi Jawa Barat….		2	5		3	10
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…	1	2	4	1	2	10
45	Kapasitas PAD mendukung…	1	2	2	2	3	10
46	PAD memberikan kontribusi…		2	3	4	1	10
47	Rasio antara biaya rutin…	1	4	2	3		10
48	Rasio antara biaya belanja..	3	3	3	1		10
49	Kebijakan pemerintah…		3	4	2	1	10
50	Kinerja birokrasi mendukung…..	1	2	3	2	2	10

CODING SHEET ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…	2	8	2			12
2	Ada kebebasan berekspresi…		3	2	5	2	12
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..		2	1	6	2	11
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …	3	3	6			12
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …	1	7	4			12
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …	1	7	4			12
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…	2	7	2			11
8	Stabilitas politik di wilayah ….	2	2	5	3		12
9	Konflik di level elit …			5	4	2	11
10	Konflik di level massa…		2	6	2	2	12
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…	1	1	2	5	3	12
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…	1	3	4	3	1	12
13	Masyarakat percaya kepada institusi…	3	6	3			12
14	Masyarakat percaya kepada figur…	2	5	5			12
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		4	8			12
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas	1	6	4	1		12
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..	1	8	2	1		12
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas	2	8	2			12
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…	2	6	4			12
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	2	10				12
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…	5	2	5			12
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	3	3	6			12
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…	3	4	5			12
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..		2	8	2		12
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..	4	7	1			12
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…	1	9	2			12
27	Alokasi APBD digunakan…		3	2		7	12
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..		2	1	4	5	12
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar		8	2	2		12
30	Sarana penyampaian keluhan…	1	10	1			12
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif	1	2	2	1	6	12
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif		1	1	6	4	12
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		2	2	3	5	12
34	Praktik pemberian biaya tambahan…		3	1	1	7	12
35	Praktek penegakan hukum…	5	4	1	1	1	12
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…		8	4			12
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …		9	3			12
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…	1	6	4	1		12
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	2	6	3	1		12
40	Distribusi pendapatan…		3		6	3	12
41	Kesenjangan pembangunan…		3		5	4	12
42	Investasi baik asing…		2	6	4		12
43	Investasi Jawa Barat….		1	6	5		12
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		5	5	2		12
45	Kapasitas PAD mendukung…		5	5	1	1	12
46	PAD memberikan kontribusi…		4	4	3	1	12
47	Rasio antara biaya rutin…		8	4			12
48	Rasio antara biaya belanja..	1	5	6			12
49	Kebijakan pemerintah…		6	5	1		12
50	Kinerja birokrasi mendukung…..	3	2	7			12

CODING SHEET TOKOH MASYARAKAT

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…		2	1			3
2	Ada kebebasan berekspresi…	1		1		1	3
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..	1		1	1		3
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …		1	2			3
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …		3				3
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		2	1			3
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…			3			3
8	Stabilitas politik di wilayah ….		1		2		3
9	Konflik di level elit …		1	1	1		3
10	Konflik di level massa…		1		2		3
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…			2	1		3
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…		1	2			3
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		1	2			3
14	Masyarakat percaya kepada figur…		2	1			3
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		1	2			3
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		2	1			3
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..			3			3
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas			2	1		3
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		1	1	1		3
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN		3				3
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…		1	1	1		3
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…		2	1			3
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…		1	1	1		3
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..		2		1		3
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		1		2		3
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		1	2			3
27	Alokasi APBD digunakan…			1	2		3
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..		2		1		3
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar		1	2			3
30	Sarana penyampaian keluhan…		1	2			3
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif		1	2			3
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif	1		2			3
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		2	1			3
34	Praktik pemberian biaya tambahan…		1	1	1		3
35	Praktek penegakan hukum…		2	1			3
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…			2	1		3
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …		1	2			3
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…		1	1	1		3
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…			3			3
40	Distribusi pendapatan…		2		1		3
41	Kesenjangan pembangunan…		1	1	1		3
42	Investasi baik asing…			2	1		3
43	Investasi Jawa Barat….			1	2		3
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		1	2			3
45	Kapasitas PAD mendukung…			1	2		3
46	PAD memberikan kontribusi…		1	1	1		3
47	Rasio antara biaya rutin…		1	2			3
48	Rasio antara biaya belanja..		2	1			3
49	Kebijakan pemerintah…			3			3
50	Kinerja birokrasi mendukung…..		1	2			3

CODING SHEET TOKOH AGAMA

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…		2	1		1	4
2	Ada kebebasan berekspresi…		1	1	1	1	4
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..		1	1	1	1	4
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …			3		1	4
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …		1	2		1	4
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		2	1		1	4
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…		2	1		1	4
8	Stabilitas politik di wilayah ….			2		2	4
9	Konflik di level elit …	1	2		1		4
10	Konflik di level massa…		1		2	1	4
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…			3	1		4
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…			1	3		4
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		1	2	1		4
14	Masyarakat percaya kepada figur…		1	2	1		4
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		1	2	1		4
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		2	1	1		4
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..		1	2	1		4
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas		2		2		4
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		1	2		1	4
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN		3		1		4
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…		2	1	1		4
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…		2	1	1		4
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…		1	1	2		4
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..		3	1			4
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		1	2	1		4
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		1	1	2		4
27	Alokasi APBD digunakan…	1		3			4
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..	1		1	2		4
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar		2	1	1		4
30	Sarana penyampaian keluhan…		2	2			4
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif		1	2	1		4
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif		1	2	1		4
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		2		2		4
34	Praktik pemberian biaya tambahan…	1		3			4
35	Praktek penegakan hukum…		4				4
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…		2	1	1		4
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …		2	1	1		4
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…		2	1	1		4
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…		2	1	1		4
40	Distribusi pendapatan…		1	1	2		4
41	Kesenjangan pembangunan…				4		4
42	Investasi baik asing…			1	3		4
43	Investasi Jawa Barat….		2	1	1		4
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		2	2			4
45	Kapasitas PAD mendukung…		1	2	1		4
46	PAD memberikan kontribusi…		1	2	1		4
47	Rasio antara biaya rutin…		2	2			4
48	Rasio antara biaya belanja..		2	2			4
49	Kebijakan pemerintah…		1	1	2		4
50	Kinerja birokrasi mendukung…..		1	1	2		4

CODING SHEET PARTAI POLITIK

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…		2	2	1		5
2	Ada kebebasan berekspresi…			1	3	1	5
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..			1	2	2	5
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …		1	4			5
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …		2	2		1	5
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		1	3	1		5
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…		4		1		5
8	Stabilitas politik di wilayah ….			2	3		5
9	Konflik di level elit …		1	2	2		5
10	Konflik di level massa…		1	2	2		5
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…		1	1	3		5
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…		1	3	1		5
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		3	1	1		5
14	Masyarakat percaya kepada figur…		4		1		5
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		2	2	1		5
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		3	2			5
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..		4	1			5
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas		4	1			5
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		2	3			5
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	1	3	2			6
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…	1	3	1			5
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	1	4				5
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…	1	3	1			5
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..	1	3	1			5
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		4	1			5
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		3	2			5
27	Alokasi APBD digunakan…			3	2		5
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..		3	2			5
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar	1	4				5
30	Sarana penyampaian keluhan…	1	3	1			5
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif		1	1	2	1	5
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif		3	1	1		5
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…			3	2		5
34	Praktik pemberian biaya tambahan…			1	3	1	5
35	Praktek penegakan hukum…	1	2	1	1		5
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…	1	3	1			5
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …		4	1			5
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…		3	2			5
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	1	2	2			5
40	Distribusi pendapatan…			1	3	1	5
41	Kesenjangan pembangunan…			2	3	1	6
42	Investasi baik asing…		1	2	2		5
43	Investasi Jawa Barat….			4	1		5
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		1	1	3		5
45	Kapasitas PAD mendukung…		2		2		4
46	PAD memberikan kontribusi…			5			5
47	Rasio antara biaya rutin…	1	4				5
48	Rasio antara biaya belanja..	1	4				5
49	Kebijakan pemerintah…		1	4			5
50	Kinerja birokrasi mendukung…..		3	2			5

CODING SHEET APARAT PEMERINTAH

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…		1	4	1		6
2	Ada kebebasan berekspresi…				4	2	6
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..			1	2	3	6
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …			4	2		6
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …		1	2	3		6
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …			3	3		6
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…	1	3		2		6
8	Stabilitas politik di wilayah ….				6		6
9	Konflik di level elit …		1	2	3		6
10	Konflik di level massa…		1	4	1		6
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…		1	3	2		6
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…		1	3	2		6
13	Masyarakat percaya kepada institusi…	1	1	3	1		6
14	Masyarakat percaya kepada figur…		1	4	1		6
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		1	3	2		6
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		1	3	2		6
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..		1	3	2		6
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas		2	3	1		6
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		2	3		1	6
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN	1	2	2	1		6
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…		3	2	1		6
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	1	2	3			6
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…		3	3			6
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..	2	3	1			6
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..	1	1	3	1		6
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…	1	2	2	1		6
27	Alokasi APBD digunakan…	1	3	2			6
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..	1	2	2		1	6
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar	1	1	3	1		6
30	Sarana penyampaian keluhan…	1	2	2	1		6
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif		2	2		2	6
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif	1	2	2		1	6
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…		1	3		2	6
34	Praktik pemberian biaya tambahan…		1	3	1	1	6
35	Praktek penegakan hukum…	1		4	1		6
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…	1		4	1		6
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …	1	1	4			6
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…	1		2	3		6
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…	1		2	3		6
40	Distribusi pendapatan…	1	1	1	2	1	6
41	Kesenjangan pembangunan…	1		2	2	1	6
42	Investasi baik asing…		1	2	1	2	6
43	Investasi Jawa Barat….		2		2	2	6
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…			3	3		6
45	Kapasitas PAD mendukung…		1	3	2		6
46	PAD memberikan kontribusi…			2	2	2	6
47	Rasio antara biaya rutin…		1	4	1		6
48	Rasio antara biaya belanja..		2	2	2		6
49	Kebijakan pemerintah…			4	1	1	6
50	Kinerja birokrasi mendukung…..			5		1	6

CODING SHEET PENGACARA

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi…			2	1		3
2	Ada kebebasan berekspresi…			1		2	3
3	Masyarakat dapat melakukan aktifitas kelompok..				1	2	3
4	Penyelenggaraan pemerintahan dan …		1	2			3
5	Pemerintah Prov Jabar memfasilitasi …		1		2		3
6	Pemerintah Prov Jabar sering mengundang …		1			2	3
7	Warga dapat mempengaruhi kualitas…		1			2	3
8	Stabilitas politik di wilayah ….		1	1	1		3
9	Konflik di level elit …			1		2	3
10	Konflik di level massa…				1	2	3
11	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat…				1	2	3
12	Konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha…				1	2	3
13	Masyarakat percaya kepada institusi…		1	2			3
14	Masyarakat percaya kepada figur…		1	2			3
15	Perda-perda di Jawa Barat dapat…		1				1
16	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki efektifitas		1			2	3
17	Perda-perda di Jawa Barat dapat meningkatkan stabilitas..		1	2			3
18	Perda-perda di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas		1	1		1	3
19	Perda-perda di Jawa Barat memberdayakan usaha kecil…		1	2			3
20	Perda-perda di Jawa Barat dapat menurunkan praktik KKN		1	2			3
21	Pemerintah Prov Jawa Barat konsisten…		1	2			3
22	Pelaksanaan yudisial atau penegakan hukum…	1		2			3
23	Struktur organisasi birokrasi pemerintah…			3			3
24	Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Prov Jawa Barat..		1	2			3
25	Kompetensi aparatur birokrasi pemerintah..		1	2			3
26	Proporsi APBD Pemerintah Prov Jawa Barat…		1	2			3
27	Alokasi APBD digunakan…		1	1	1		3
28	Alokasi APBD digunakan untuk kepentingan DPRD..	2	1				3
29	Kinerja pelayanan publik Pemprov Jabar		1	2			3
30	Sarana penyampaian keluhan…		2	1			3
31	Korupsi banyak terjadi di lingkungan eksekutif				2	1	3
32	Korupsi banyak terjadi di lingkungan legislatif			1	1	1	3
33	Dunia usaha mendorong terjadinya praktik korupsi…				1	2	3
34	Praktik pemberian biaya tambahan…					3	3
35	Praktek penegakan hukum…	1		2			3
36	Pencapaian IPM sudah sesuai…		3				3
37	Pencapaian IPM di bidang ekonomi …	1	2				3
38	Pencapaian IPM di bidang kesehatan…	1	2				3
39	Pencapaian IPM di bidang pendidikan…		1	2			3
40	Distribusi pendapatan…					3	3
41	Kesenjangan pembangunan…					3	3
42	Investasi baik asing…		1	2			3
43	Investasi Jawa Barat….		1			2	3
44	Investasi di Jawa Barat memberikan kontribusi…		1	2			3
45	Kapasitas PAD mendukung…		1	2			3
46	PAD memberikan kontribusi…			2	1		3
47	Rasio antara biaya rutin…		1	2			3
48	Rasio antara biaya belanja..		1	2			3
49	Kebijakan pemerintah…		1			2	3
50	Kinerja birokrasi mendukung…..		1	2			3